

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

Laporan Kinerja Tahunan 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Lakip.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pada Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, diukur dari rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok yang direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang tersedia dan juga memberdayakan Sumber Daya Aparatur yang kemampuannya terbatas.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh adanya:

- a. Kerjasama staf antar bagian/bidang yang telah terjalin baik.
- b. Pengalaman dan kemampuan staf melaksanakan pekerjaan.
- c. Sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Disiplin pegawai cukup baik.

Kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai Indikator Kinerja pada sasaran strategis adalah

terbatasnya dana dan kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan keterbatasan sarana dan prasarana Kabupaten/Kota dalam menjaring/menyerap berbagai informasi situasi IPOLEKSOSBUD di daerahnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan pemecahan masalah dengan cara mengajukan dana tambahan untuk program kegiatan dan melakukan peninjauan kembali penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kemampuan serta mengirim Sumber Daya Aparatur mengikuti pendidikan dan latihan Pengembangan Wawasan Kebangsaan agar dapat menjadi Narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Untuk keterbatasan sarana dan prasarana Kabupaten/Kota terhadap informasi terkini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat akan mengintensifkan Koordinasi dengan Kab/Kota,

Akhirnya, melalui Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2020  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Drs. ALEXANDER ROMBONANG, MMA**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690308 198803 1 003